

## Kampanye Terbuka, KPU Kota Serang Larang Knalpot Bising

**SERANG (IM)**- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang tegas melarang seluruh partai politik, simpatisan, dan peserta pemilu menggunakan kendaraan berknalpot tidak sesuai standar atau bising selama kampanye terbuka Pemilu 2024.

Selain itu, KPU Kota Serang juga menetapkan lokasi kampanye rapat umum atau kampanye terbuka di tiga lokasi yakni, Stadion Maulana Yusuf, Gapura Indra Hall, dan Bumi Perkemahan Walantaka untuk peserta Pemilu Serentak 2024 melalui sistem blok. “Memang di Kota Serang ini untuk lapangan terbuka yang cukup luas masih terbatas. Untuk itu, kita sepakat menggunakan sistem blok,” kata dia.

Ade menjelaskan, untuk penerapan sistem blok nantinya seluruh partai politik akan mengikuti calon presiden dan wakil presidennya masing-masing untuk turut melakukan kampanye terbuka. “Jadi partai politik mengikuti masing-masing capres dan cawapresnya. Misalkan pasangan capres cawapres nomor urut 1 diikuti partai pengusung dan begitu seterusnya,” kata dia. ● **pra**

KPU juga mengimbau agar seluruh peserta Pemilu 2024 yang hadir kampanye terbuka dapat menaati aturan yang telah disampaikan. “Kami imbau juga semua yang ikut kampanye taati aturan pemilu dan jangan juga pakai knalpot brong, ikuti aturan lalu lintas saat berkampanye,” kata dia.

## Warga yang Berminat Bansos Perguruan Tinggi Daftar di DTKS

**TANGERANG (IM)**- Dinas Sosial Kota Tangerang mengimbau kepada masyarakat yang berminat program bansos berbasis perguruan tinggi namun belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka bisa melakukan pendaftaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani di Tangerang, Senin (22/1) mengatakan pemohon bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan syarat dan ketentuan diantaranya mendatangi kelurahan membawa fotocopy Kartu Keluarga dan KTP.

Jika tidak bisa datang, pemohon bisa mengirimkan langsung ke nomor pelayanan Dinsos Kota Tangerang secara online ke nomor 0895-6087-22422.

Selanjutnya, operator Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) akan melakukan pengecekan DTKS. Bila terdaftar dalam DTKS, Operator Data SIKS-NG kelurahan akan mengirimkan data dan nomor whatsapp pemohon ke Dinas Sosial melalui nomor pelayanan online 0895-6087-22422.

“Dinsos Kota Tangerang akan menerbitkan surat ket-

la mengatakan, masa kampanye dimulai di tanggal 21 Januari-10 Februari 2024. Maka, di luar tanggal tersebut kampanye terbuka tidak diperbolehkan, semua APK sudah ditertibkan, karena sudah memasuki masa tenang.

Selain itu, KPU Kota Serang juga menetapkan lokasi kampanye rapat umum atau kampanye terbuka di tiga lokasi yakni, Stadion Maulana Yusuf, Gapura Indra Hall, dan Bumi Perkemahan Walantaka untuk peserta Pemilu Serentak 2024 melalui sistem blok. “Memang di Kota Serang ini untuk lapangan terbuka yang cukup luas masih terbatas. Untuk itu, kita sepakat menggunakan sistem blok,” kata dia.

Ade menjelaskan, untuk penerapan sistem blok nantinya seluruh partai politik akan mengikuti calon presiden dan wakil presidennya masing-masing untuk turut melakukan kampanye terbuka. “Jadi partai politik mengikuti masing-masing capres dan cawapresnya. Misalkan pasangan capres cawapres nomor urut 1 diikuti partai pengusung dan begitu seterusnya,” kata dia. ● **pra**

erangan terdaftar DTKS berupa file PDF dan dikirimkan ke nomor whatsapp pemohon,” ujarnya.

Pemerintah Kota Tangerang membuka pendaftaran Bantuan Sosial (Bansos) Beasiswa Perguruan Tinggi untuk anggaran murni tahun 2025 dengan kuota 300 mahasiswa.

“Bagi mahasiswa kurang mampu dan memiliki KTP Kota Tangerang, bisa mengajukan Bansos Beasiswa Perguruan Tinggi ini melalui Aplikasi Tangerang LIVE pada menu Bansos Mahasiswa. Setiap penerima manfaat yang lolos verifikasi akan mendapat bansos senilai Rp6 juta. Bagi yang berminat untuk segera mendaftarkan diri,” katanya.

La pun berharap, dengan adanya Bansos Beasiswa Perguruan Tinggi ini dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi generasi muda di Kota Tangerang untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

“Sehingga, dapat menjadi harapan bagi kesejahteraan keluarganya dan turut berperan serta membangun Kota Tangerang menjadi lebih baik lagi,” pungkask dia. ● **pp**



**PEMERINTAH DORONG PERTUMBUHAN UMKM LEBIH PESAT**  
Pekerja menjemur kerupuk di sentra UMKM Mandiri di Kampung Pekarungan, Serang, Banten, Senin (22/1). Menkop UKM Teten Masduki menyatakan pemerintah akan mendorong UMKM supaya tumbuh lebih pesat di tahun 2024 dari 68,2 juta pelaku diproyeksikan bisa bertambah menjadi 83,3 juta pelaku pada akhir tahun 2034.

## Sekda Kota Tangerang Ingatkan ASN Tidak Jadi Tim Sukses Pemilu

**TANGERANG (IM)**- Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarnan mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan kota setempat agar tidak ada yang menjadi tim sukses dalam pemilu dan pilkada.

“Sudah semakin mendekati jelang pelaksanaan, untuk itu saya harap agar seluruh ASN dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam kelancaran dan kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu dengan selalu mengedepankan netralitas,” kata dia di Tangerang, Senin (22/1).

Dia juga mengajak seluruh ASN Pemerintah Kota Tangerang berpartisipasi dalam menyaksikan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang dengan terus menjaga netralitas. “Bantu

kesiapan yang diperlukan agar pelaksanaan pemilu di Kota Tangerang bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh ASN terus meningkatkan kinerja, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. “Sudah ada Super Apps Tangerang Ayo, saya harap dapat semakin banyak masyarakat yang terbantu dan terlayani,” katanya.

Saat ini ada 12 GOR yang menjadi lokasi penempatan logistik Pemilu 2024 di daerah itu, yaitu GOR Dimiyati, GOR Balai Rakyat, GOR Batucapeper, GOR Benda, GOR Gondrong, GOR Neglasari, GOR Sudimara Pinang, GOR Pedurenan, GOR Sudimara Selatan, GOR Larangan Utara, GOR Jatiuwung, dan GOR Cibodas. ● **pp**



## DAMPAK PENUNGGAKAN BIAYA SEWA KIOS DI PASAR BADAK

Kondisi kios pedagang yang tutup akibat menunggak sewa kios di Pasar Badak, Pandeglang, Banten, Senin (22/1). Sebanyak 83 kios pedagang tersebut belum dibayarkan biaya sewanya selama bertahun-tahun hingga menyebabkan kerugian untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang senilai Rp200 juta.

# Pj Gubernur Banten Sindir Pengembang KEK Tanjung Lesung

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mempertanyakan progres kewajiban pengembang dalam mengelola KEK Tanjung Lesung. Padahal, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kawasan tersebut.

**SERANG (IM)**- Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menyindir pengembang kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Orang nomor satu di Banten itu mempertanyakan progres kewajiban pengembang dalam mengelola KEK Tanjung Lesung. Padahal, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kawasan tersebut.

Al mengaku, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka daya dukung kepariwisataan dan aktivitas lain yang

relevan dengan pembangunan Kabupaten Pandeglang.

“Perlu ada review bersama tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mengimplementasikan rencana-rencana kerja yang dijanjikan,” tegas Al.

Pernyataan itu dilontarkan Al lantaran pengembangan KEK Tanjung Lesung menjadi salah satu temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja Pemprov Banten sekaligus instansi terkait lainnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan

Provinsi Banten.

Al menjelaskan, sebagai informasi, tugas-tugas pemerintah untuk mendukung kawasan itu telah diupayakan dengan seoptimal mungkin, seperti infrastruktur berjalan dan berbagai regulasi yang telah disiapkan.

“Tapi juga, kita menghendaki keseriusan implementasi tugas dan tanggung jawab dari pengembang itu sendiri,” tandas pria yang dilantik sebagai Pj Gubernur Banten pada 12 Mei 2022 lalu.

Kata dia, Pemda adalah pengembang kawasan pendukung. Sementara, pengembang kawasan inti adalah yang mengajukan upaya agregat kerja dalam rangka sesuai dengan usul perencanaan pada waktu diajukan dan mendapatkan izin mengelola kawasan.

“Oleh karenanya, kita sedang mereview dengan tim tentang Dewan Pengembangan KEK

Provinsi Banten. Dan kita akan memasukkan langkah-langkah kerja, termasuk kewajiban dari pengembang itu sendiri,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Al, kemungkinan pihaknya akan merekomendasikan untuk memberi waktu empat tahun kepada pengembang untuk mencapai apa yang telah diajukan pada saat perencanaan untuk izin pengelolaan kawasan.

“Karena kawasan itu sudah dikelola hampir 25 tahun. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada BPK, yang telah menyoroti kinerja, ini bagian dari komitmen bersama,” tegas pria yang masih menjabat sebagai Sekda Banten definitif ini.

Ia mengaku, apabila terjadi keterlambatan percepatan pembangunan, maka banyak hal yang akhirnya masyarakat tidak bisa lakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

“BPK kan menyam-

paikan tanggung jawab bersama untuk sebuah kawasan yang telah ditetapkan satu kawasan tertentu. Salah satunya KEK Tanjung Lesung. Nah itu kan perlu penetapan tahapan pelaksanaannya, di antaranya membuat ritme waktu pelaksanaan. Itu kan sudah 24 tahun lebih, bahkan 25 tahun. Kita ingin bersama untuk memajukan itu,” ujarnya.

Ia mengaku tugas-tugas pemerintah sudah terarah mendukung KEK Tanjung Lesung. Pemprov Banten bahkan sudah menyiapkan jalan dengan kapasitas mantap ke kawasan tersebut.

“Dan sudah terbangun serta sedang dalam proses penyelesaian Tol Serang-Panimbang. Nah kita juga berharap pihak pengembang juga mengoptimalkan peran-perannya,” tegas Al. Pada dasarnya ini adalah percepatan penyelesaian kawasan. ● **pra**

## TEKAN ANGKA STUNTING

# Pemkab Mukomuko Bengkulu Dapat DAK Rp4 Miliar

**MUKOMUKO (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tahun 2024 memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4 miliar dari pemerintah pusat untuk menekan angka stunting di daerah ini.

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Mukomuko, Panji Surya di Mukomuko, Senin (22/1), mengatakan DAK untuk penanganan stunting tahun 2024 naik sedikit dari sebesar Rp3,7 miliar menjadi Rp4 miliar lebih.

“Kalau target pemerintah pusat penurunan angka stunting 14 persen tahun 2024, tapi kami upayakan angka stunting

turun menjadi 12 persen dalam tahun ini,” ujarnya.

Terkait dengan kegiatan penanganan stunting di dinas ini masih mengandalkan DAK dan biaya operasional keluarga berencana untuk Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Ia mengatakan program dan kegiatan penanganan stunting masih sama seperti tahun 2023, hanya saja tahun 2024 PLKB semakin rutin ke lapangan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) kasus stunting dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko pada tahun 2023 sebanyak 22,2 persen dari total sampel mereka sekitar 3.000.

Data stunting tahun

2023 dari 17 puskesmas di daerah ini, yakni stunting dari status gizi elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGRM) angka stunting atau kekerdilan di daerah itu tahun 2023 sebesar 5,1 persen dari sebanyak 10.401 anak yang melakukan kunjungan ke posyandu.

Dari data stunting tahun 2023 tersebut, sebanyak 532 anak stunting yang terdiri atas anak sangat pendek 117 anak dan 415 anak pendek, lalu normal 9.849 anak dan anak tinggi 20 anak.

Ia mengatakan instansinya bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko dan TNI dalam menurunkan angka stunting di daerah ini. ● **pra**

## Al Muktabar Dukung Kejati Banten Usut Kasus Situ Ranca Gede Jakung

**SERANG (IM)**- Pejabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menyampaikan dukungannya terhadap penegakan hukum aset daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten sendiri telah memiliki kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten di bawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pengelolaan aset daerah.

Diketahui, ratusan aset milik Pemprov Banten saat ini masih bermasalah. Bahkan, banyak di antaranya yang kini dikuasai oleh pihak swasta, dan beralih fungsi.

Salah satunya yakni Situ Ranca Gede di Kabupaten Serang yang kini telah beralih fungsi menjadi kawasan industri dan dikuasai pihak swasta. Kasus Situ Ranca Gede ini pun tengah disidiki oleh Kejati Banten.

“Kita memiliki kerjasama dengan Kejati dan juga di bawah koordinasi KPK atas pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah yaitu adalah bagian dari aset daerah dan bila ada pelanggaran di sana tentu akan dilakukan penegakan hukum,” ujar Al Muktabar saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (22/1).

Al Muktabar mengatakan, proses hukum harus ditegakkan. Pihaknya pun mendukung penuh Kejati Banten dalam penyelidikan kasus alih fungsi Situ Ranca Gede ini. “Kita tentu semua patuh kepada hukum yang sedang berproses, dan kita semua di mata hukum sama,” ucapnya.

Ia menyebut, Situ itu dan aset daerah lainnya seharusnya digunakan semaksimal mungkin guna kepentingan daerah, bukan kepentingan pihak swasta maupun pribadi.

Pria yang masih menjabat

sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Pemprov Banten ini meminta kepada Kejati Banten untuk tidak tebang pilih dalam menindak pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus aset daerah ini.

“Aset daerah ini seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi daerah, sehingga bila ada indikasi-indikasi terkait dengan perlunya pendakwaan hukum. Maka itu harus ditegakkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti mengakui bahwa Pemprov Banten baru memberikan perhatian kepada aset jenis situ dalam lima tahun terakhir ini. Menurutnya, penyelesaian masalah aset jenis situ ini sangatlah sulit dan memerlukan proses yang alot, sebab banyak situ milik Pemprov Banten yang kini sudah dikuasai pihak lain.

“Nah untuk Jakung ini memang baru aware untuk situ itu mungkin di 5 tahun terakhir ini kan kita bertahap, untuk menyelesaikan 10 bidang situ aja sudah luar biasa effort nya lama,” ungkapnya.

“Beda dengan bidang-bidang lain sudah clear atau bidang bidang lain yang di proses pengadaan, karena situ ini kita akui pada saat pemeriksaan sekitar tahun 2007 itu berdasarkan hasil inventarisasi dari kanwil BPN kita hanya mencatat saja,” tambahnya.

Selain Situ Ranca Gede Jakung, Rina mengatakan, Pemprov Banten memiliki 333 bidang aset lainnya yang masih bermasalah. Ratusan aset itu didominasi oleh aset tanah yang mencapai 171 bidang, sementara, untuk situ tinggal 127 bidang yang masih bermasalah. “Kita mempunyai di catatan aset daerah kita situ itu 137, dari 137 situ itu kita lakukan pensertifikatan sudah 10 bidang sertifikat, nanti PR kita tinggal 127 lagi,” pungkasknya. ● **pra**



## PERAKITAN KOTAK SURAT SUARA PEMILU 2024

Pekerja merakit kotak surat suara Pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1). KPU Kota Bogor mulai merakit sebanyak 14.565 kotak surat suara untuk Pemilu 2024 yang akan didistribusikan ke 2.913 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 6 kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Bogor.